

**MAKALAH KEBIJAKAN PERTANIAN
LUMBUNG PANGAN DAERAH PERBATASAN**



Disusun Oleh:

1. Cornelia Dian Agata H0817026
2. Rosyid Dwi Windarto H0817090

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat.

Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada Dosen serta teman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moriil maupun materil, sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan-kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal pengkonsolidasian kepada dosen serta teman-teman sekalian, yang kadangkala hanya menturuti egoisme pribadi, untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah-makah kami dilain waktu.

Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari judul ini (masyarakat desa dan masyarakat kota) sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada.

Surakarta, 29 April 2020

Penyusun

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan Indonesia relatif tertinggal dari wilayah lain. Hal tersebut selain karena faktor geografis, juga disebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya dari aspek sosial ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, khususnya dalam pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Pertanian telah mengembangkan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. Sesuai Nawa Cita dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dimulai dari pinggiran, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan menjadi bagian integral yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pertanian tidak hanya berhenti pada kecukupan pangan. Diperhatikan pula aspek ekspor komoditas bernilai tinggi untuk meningkatkan pemasukan negara dan kegiatan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Fokus utama pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi pangan dan pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan penduduk setempat dan daerah lain di Indonesia. Dilakukan juga ekspor ke negara tetangga, terutama Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Dibutuhkan 1 juta hektare lahan pertanian untuk pengembangan lumbung pangan di daerah perbatasan. Kementan telah menganggarkan bantuan benih unggul senilai Rp 2 triliun. Program lumbung pangan daerah perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah ini berdampak pada kehidupan masyarakat daerah perbatasan. Program lumbung pangan daerah perbatasan nantinya akan menjadi gerbang ekspor ke negara tetangga. Lumbung pangan daerah perbatasan memiliki banyak manfaat, tetapi pasti terdapat pula kelemahan atau dampak negatif dari pelaksanaan program lumbung pangan daerah terhadap daerah ataupun aspek yang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program lumbung pangan perbatasan?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan program lumbung pangan perbatasan?

C. Tujuan

1. Mengetahui pelaksanaan program lumbung pangan perbatasan.
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan program lumbung pangan perbatasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Daerah Perbatasan

Wilayah perbatasan adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain baik darat, laut atau udara yang harus diatur melalui perjanjian. Sehubungan dengan pengelolaan perbatasan negara, “penguasaan efektif” terbukti menjadi hal yang signifikan untuk menghilangkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan teritorial suatu negara. Pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan. Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Permasalahan menyangkut perbatasan memiliki dimensi yang sangat kompleks (Bangun, 2017).

Perbatasan sebuah negara, atau *state's border*, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah (Budi, 2017).

Pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan perlu memperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan. Stephen B. Jones dalam bukunya yang berjudul *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commisioners* merumuskan teori tentang pengelolaan perbatasan negara. Jones membagi ruang lingkup

pengelolaan perbatasan dalam empat bagian, yaitu: *allocation*, *delimitation*, *demarcation* dan *administration/management*. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaann (Bangun, 2017).

B. Lumbung Pangan

Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Keberadaan lumbung pangan cenderung menurun karenabeberapa sebab, yaitu: (a) penerapan revolusi hijau yang mengintroduksi teknologi padi unggul, danmodernisasi pertanian dinilai tidak sesuai dengan lumbung tradisional masyarakat, (b) keberadaan Bulog yangberperan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (gabah) di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke perdesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung orientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di daerah yang secara tradional telah mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan pangan dengan kendala aksesibilitas (Rachmat *et al*, 2011).

Lumbung pangan berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun belum mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Proses mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah yang memungkinkan mobilitas cadangan pangan antar wilayah sebagaimana dilakukan oleh Bulog. Adanya penurunan peran Bulog diperlukan pemikiran untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pada era otonomi daerah.

Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah. Penanganan kerawanan pangan juga sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan penyediaan bahan pangan. Perbaikan kondisi kerawanan pangan dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (Rachmat *et al*, 2011).

Pengembangan lumbung pangan umumnya dilakukan pada masyarakat yang pernah mengalami kerawanan pangan, yang sebagian besar berada di daerah yang mempunyai kendala dalam aksesibilitas. Dengan demikian tidak mengherankan apabila keberadaan lumbung berada di desa pinggir hutan dimana masyarakatnya masih menerapkan ladang berpindah, atau daerah dengan keterbatasan sarana transportasi. Secara tradisional lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan di lumbung oleh masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat berupa penyimpanan untuk kepentingan keluarganya maupun dipinjamkan ke anggota masyarakat. Pola simpan pinjam yang berlaku umumnya masih berdasarkan kaidah sosial tanpa mencari keuntungan, sesuai dengan norma pembangunan lumbung pangan oleh masyarakat (Rachmat *et al*, 2011).

C. Ekspor

Ekspor merupakan upaya dalam menjalankan penjualan komoditas yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Berdasarkan hasil estimasi dan penelitian terdahulu, hal ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika ekspor meningkat maka jumlah cadangan devisa yang dimiliki akan ikut meningkat sehingga persediaan impor dalam beberapa bulan berikutnya akan tercukupi dan akan memperbesar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi ekonomi. (Benny,2013)

D. Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi. (Suharyanto,2011)

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Lumbung Pangan Perbatasan

1. Potensi Sumber Daya Pelaksanaan Lumbung Pangan Perbatasan

a. Sumber Daya Lahan Pertanian

Khusus di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, analisis BBSDLP (2015) menunjukkan bahwa luas lahan potensial untuk pertanian mencapai 19,19 juta hektar atau 20,01 persen dari lahan potensial secara keseluruhan. Dari luas lahan potensial tersebut, 5,32 juta hektar di antaranya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian.

b. Potensi Daya Iklim dan Air

Sesuai dengan posisi geografi, topografi, dan faktor biofisik wilayah perbatasan, kondisi iklim atau agroklimat wilayah perbatasan sangat beragam. Sebagaimana umumnya wilayah Indonesia, semua wilayah perbatasan beriklim tropika basah (humid tropic) dengan pembedaan musim hujan dan musim kemarau yang nyata. Pola curah hujan sebagian besar adalah monsunial (monsoon) yang eksponensial dengan puncak hujan sekitar bulan Desember-Januari. Pola equatorial terdapat di sekitar zona garis khatulistiwa dengan pola curah hujan bimodal (dua puncak), khususnya di daerah Kalimantan Barat, Sumatera bagian tengah dan Sulawesi bagian tengahutara.

c. Sumber Daya Manusia

Wilayah perbatasan dicirikan oleh tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan tidak merata pada areal yang relatif luas. Sebagai gambaran, kepadatan penduduk di wilayah perbatasan rata-rata sekitar 39 jiwa/km², jauh lebih rendah dibanding kepadatan penduduk di wilayah nonperbatasan yang mencapai 183 jiwa/km². Pada kawasan daratan, kepadatan penduduk yang lebih tinggi terdapat di wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste, rata-rata 168 jiwa/km². Pada

kawasan lautan, kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada wilayah perbatasan dengan laut lepas, rata-rata 249 jiwa/km².

2. Peluang Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan

Potensi ekspor komoditas pertanian di wilayah perbatasan belum banyak digarap karena belum adanya regulasi dan fasilitas penunjang. Perdagangan selama ini hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan. Mereka berbelanja ke Malaysia didasarkan pada BTA yang diberlakukan sejak 1970. Dalam *Agreement* tersebut terdapat ketentuan bahwa warga perbatasan hanya bisa berbelanja maksimal 600 RM atau setara dengan Rp1,8 juta per orang setiap kali melintas perbatasan.

Potensi ekspor komoditas pertanian dari wilayah perbatasan cukup besar dengan diberlakukan perjanjian internasional. Terutama dengan negara tetangga, seperti *ASEAN Community*, Indonesia Malaysia Singapore *Growth Triangle* (IMS-GT), Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines-East *ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia Malaysia Thailand-*Growth Triangle* (IMT-GT), dan Australian-Indonesia *Development Area* (AIDA). Hal ini menjadi peluang besar ekspor komoditas pertanian ke negara tetangga. Berlakunya beberapa kesepakatan kerja sama internasional tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian di wilayah perbatasan.

Ekspor komoditi beras dan jagung dari Indonesia ke beberapa negara tetangga masih relatif kecil, namun peluang ekspor kedua komoditas tersebut berpotensi menjadi lebih besar pada tahun 2017, seiring dengan disetujuinya kuota ekspor beras premium dan jagung ke negara Malaysia. Dengan demikian peluang ekspor komoditi pertanian di wilayah perbatasan perlu dikelola secara serius. Momentum ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang ekspor komoditas pertanian Indonesia melalui wilayah perbatasan.

3. Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Peluang Ekspor Program Lumbung Pangan Perbatasan.

Potensi ekspor komoditas pertanian di wilayah perbatasan belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun berbagai produk potensial pertanian sudah diekspor secara tradisional ke beberapa negara tetangga melalui perdagangan lintas batas, tetapi belum memberikan keuntungan ekonomi kepada petani dan masyarakat setempat beberapa strategi yang dipakai antara lain :

- a. Menjadikan target ekspor pangan di wilayah perbatasan sebagai komitmen nasional yang melibatkan seluruh stakeholder.
- b. Memperbaiki sistem logistik yang meliputi *storage* (gudang), distribusi (jalan dan armada angkutan), *terminal handling*, dan *shipping* untuk meningkatkan efisiensi perdagangan di wilayah perbatasan.
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang, revitalisasi pasar tradisional, pembangunan pusat distribusi dan konektivitas antardaerah dan antarsimpul logistik.
- d. Meningkatkan kapasitas produksi dan standar produk pangan agar memenuhi standar internasional.
- e. Memfasilitasi peningkatan mutu produk pangan dan komoditas pertanian lain yang berpotensi ekspor.
- f. Mendorong produk unggulan ekspor pangan dan komoditas pertanian lainnya menjadi produk global value chain. Memperluas jaringan informasi ekspor dan impor untuk merespon kebutuhan dunia usaha, terutama eksportir kecil dan menengah.
- g. Menyederhanakan prosedur atau perizinan di pusat dan daerah, termasuk prosedur dan dokumen ekspor-impor dalam upaya mendukung pengembangan jaringan perdagangan di wilayah perbatasan.

4. Implementasi Lumbung Pangan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah perbatasan darat yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dari lima kabupaten yang ada, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Pola usahatani tanaman pangan, terutama padi dan jagung, yang diterapkan masyarakat masih bersifat tradisional, yaitu pola ladang berpindah. Hasil pertanian lainnya berupa ubi-ubian dan palawija masih sangat terbatas dan belum dikelola secara komersial. Walaupun usaha pertanian masih dikelola secara terbatas, namun hasilnya cukup memadai, seperti beras Raja Uncak di Kapuas Hulu, beras hitam di Bengkayang, dan beras merah di Sanggau, dan sudah diperdagangkan ke Sarawak-Malaysia. Komoditas lainnya seperti lada, kakao, dan pisang juga banyak diperdagangkan ke Malaysia secara tradisional.

Implementasi strategi pelaksanaan lumbung pangan harapan yaitu memperbaiki sistem logistik yang meliputi storage (gudang), distribusi (jalan dan armada angkutan), terminal handling, dan shipping untuk meningkatkan efisiensi perdagangan di wilayah perbatasan diwujudkan dengan dibangunnya tiga pintu masuk resmi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, yaitu PLBN Aruk Kabupaten Sambas, PLBN Entikong Kabupaten Sanggau, dan PLBN Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan aktivitas perdagangan, khususnya untuk komoditas pertanian di lintas batas akan meningkat. Pembangunan program dan kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat adalah berbasis kawasan guna membentuk sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan. Program tersebut akan diimplementasikan secara bertahap melalui prinsip pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program Lumbung Pangan Perbatasan diharapkan dapat

mendorong serta menjadikan daerah perbatasan sebagai *growth center* dan *growth area* berbasis pertanian. Target yang hendak dicapai di Provinsi Kalimantan Barat menurut komoditas ditetapkan berdasarkan potensi sumber daya pertanian yang dimiliki oleh setiap kabupaten perbatasan. Target tersebut terdiri atas target yang akan dicapai melalui anggaran pemerintah dan swadaya masyarakat. Untuk swadaya masyarakat dilakukan dengan membangun kemitraan pembiayaan dan pemasaran antara koperasi petani (Kelembagaan Ekonomi Petani-KEP) dengan perbankan dan pengusaha/eksportir. Sementara target melalui anggaran pemerintah akan dicapai dengan mengalokasikan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah di setiap kabupaten perbatasan dengan jumlah dan luasan tertentu.

Berbagai rencana kegiatan aksi jangka pendek dan jangka menengah untuk melaksanakan Lumbung Pangan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi: (1) peningkatan produksi dan produktivitas; (2) pembukaan lahan baru; (3) perbaikan dan keseragaman kualitas produk; (4) penyediaan alat dan mesin prapanen, panen, dan pascapanen; (5) diseminasi, pengawalan teknologi dan riset pengembangan inovasi; (6) peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan; (7) perbaikan dan pengembangan infrastruktur; dan (8) pengembangan sarana pendukung lainnya.

B. Hambatan Pelaksanaan Program Lumbung Pangan Perbatasan

1. Hambatan dari Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki berbagai keunikan dan permasalahan, antara lain:

a. Keterbelakangan infrastruktur dan aksesibilitas informasi

Pembangunan infrastruktur di perbatasan masih jauh tertinggal. Contohnya seperti infrastruktur irigasi yang mengakibatkan banyak petani di beberapa daerah kesulitan mencari air untuk lahan pertaniannya.

b. Sulitnya untuk mengakses informasi

Daerah perbatasan memiliki akses informasi yang cukup sempit sehingga dapat mengakibatkan sulitnya bertukar informasi seperti informasi tentang komoditas pertanian.

- c. Sensitif secara geopolitik, kedaulatan dan keutuhan NKRI

Banyak terjadi perang antarnegara atau antarbangsa disebabkan oleh permasalahan perbatasan.

- d. Umumnya merupakan daerah *remote* atau terpencil

Daerah perbatasan biasanya merupakan daerah dengan aksesibilitas yang rendah sehingga menyebabkan kendala tersendiri untuk pendistribusian.

- e. membutuhkan inovasi (teknologi) dan dukungan kebijakan “khusus” dan “tematik”.

Karena daerah perbatasan memiliki permasalahan yang beragam maka untuk menunjang pengembangan khususnya dalam pertanian membutuhkan teknologi dan kebijakan yang khusus untuk setiap daerahnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

1. Gagasan, konsep, dan model pengembangan wilayah perbatasan melalui pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan sebagai langkah awal dalam mewujudkan Lumbung Pangan Dunia.
2. Pengembangan wilayah perbatasan berperan penting dan prospektif, baik secara ekonomi dan ketahanan pangan maupun dari aspek sosial, keamanan, dan politik.
3. Mengacu pada masalah dan tantangannya, pengembangan Lumbung Pangan Perbatasan dilakukan secara bertahap dan terencana, terstruktur dengan mendahulukan dan mengutamakan pencapaian target ketahanan pangan di wilayah perbatasan, sebelum diekspor ke negara tetangga.
4. Kunci keberhasilan program pengembangan adalah kebijakan khusus pengembangan kawasan dan sistem usaha pertanian (SUP) modern, baik dalam penyediaan lahan dan pengembangan infrastuktur, maupun sistem investasi, penyediaan dan penataan tata niaga komoditas pertanian di wilayah perbatasan.
5. Koordinasi dan sinergitas program dari berbagai pihak terkait juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan Lumbung Pangan Perbatasan, baik antar kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah, maupun pengusaha (BUMN, BUMD dan swasta).
6. Hambatan dalam pelaksanaan program lumbung pangan perbatasan berasal dari wilayah perbatasan yang memiliki beberapa kekurangan dan kebijakan pemerintah yang belum ada untuk optimalisasi program tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dituliskan sebuah saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang membantu pengembangan program Lumbung Pangan Perbatasan dengan optimal sehingga hambatan bisa dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Budi Herman. 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*. Vol 1(1) : 53-55.
- Benny, J. 2013. Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA* 1407 Vol.1 No.4
- Budi H, B. 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal* 1(1): 52-63.
- Rachmat, Muchjidin, et all. 2011. Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. *Pusat Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian* : 44-46.
- Suharyanto, H. 2011. Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4 No.2